

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MATAUE KECAMATAN KULAWI KABUPATEN SIGI

Muhamad Dasril

¹ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email korespondensi. riel.brawijaya@gmail.com)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Dasar penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 1). Observasi. 2). Wawancara 3). Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu : 1. Komunikasi digambarkan belum berjalan dengan baik. 2. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan telah memadai, sedangkan anggaran dalam kategori belum memadai, telah terdapat informasi sedangkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, selain itu fasilitas sarana dan prasarana tidak memadai. 3. Disposisi berbagai kebijakan telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya dengan melihat pada perilaku yang cukup baik dari pelaksana kebijakan. 4. Berdasarkan aspek struktur birokrasi dikategorikan belum berjalan secara baik.

Kata Kunci, Implementasi kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Community Empowerment Policy in Mataue Village, Kulawi District, Sigi Regency. This research is based on descriptive research. To obtain the data needed for this study, the researcher used the following data collection methods: 1) Observation, 2) Interviews, 3) Documentation. Data analysis was conducted using qualitative analysis techniques. The results of the study are: 1. Communication is described as not running well. 2. The resources owned by the policy implementers are adequate, while the budget is categorized as inadequate. Information is available but there is no abuse of authority, in addition, facilities and infrastructure are inadequate. 3. The disposition of various policies that have been carried out in the context of policy implementation shows that the disposition has run as it should, as seen from the fairly good behavior of the policy implementers. 4. Based on the aspect of bureaucratic structure, it is categorized as not running well.

Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pemahaman desa menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Program pemerintah guna menanggulangi kemiskinan di perdesaan melalui Pemberdayaan Masyarakat, untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan

Persoalan kemiskinan di wilayah desa sering dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural sehingga penanganannya

memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pembelajaran pengalaman selama ini mengedepankan kemandirian dan gerakan kolektif antar masyarakat, pemerintah maupun berbagai pihak terkait lainnya di wilayah desa sebagai salah satu kunci penanggulangan kemiskinan.

Olehnya salah satu agenda penting di tingkat masyarakat perdesaan terkait implementasi kebijakan Pemberdayaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Dalam implementasinya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan peran serta masyarakat dapat menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya.

Implementasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan khususnya di Desa Mataue

Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, dengan harapan adanya program tersebut memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil observasi yang peneliti laksanakan di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat belum menyentuh secara keseluruhan kebutuhan masyarakat di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, sehingga terdapat persepsi di tengah masyarakat bahwa program tersebut belum optimal dikarenakan implementasinya belum terlaksana dengan baik. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2003;47) adalah "suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah atau cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian survey dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci, sistematis dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diteliti dari yang bersifat khusus ke umum. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Bogdan dan Biklen dalam Moleong, (2010:248) mengungkapkan : Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis data kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan diperlukan untuk memberikan

pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut. Komunikasi begitu penting dalam implementasi kebijakan karena ini melibatkan program pemerintah, sehingga seluruh komponen desa sudah seharusnya dapat memahaminya termasuk LPMD, BPD sebagai partner pemerintah desa.

Komunikasi yang efektif berimplikasi pada pemahaman implementasi kebijakan dengan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang dilakukan serta apa yang akan didapatkan jika melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka akan berdampak pada optimalisasi implementasi. Implementasi kebijakan yang efektif akan terlaksana, jika para pelaksana kebijakan akan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan upaya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang telah

ditetapkan sangat erat kaitannya dengan eksistensi pelaksana kebijakan yang membidangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Berbagai kebijakan yang dilaksanakan akan tercapai jika dari awal kebijakan tersebut di komunikasikan langsung, termasuk di komunikasikan dengan LPMD, sehingga kebijakan tersebut tidak salah sasaran.

Pada dasarnya komunikasi sebagai suatu proses, mempunyai persamaan dengan bagaimana mengekspresikan perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (*kontradiktif*) dan hal-hal yang sejalan (*selaras, serasi*) serta meliputi proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi dan hal tersebut belum terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

Bagaimana Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang meliputi sumber daya aparat pemerintah desa, sumber daya pembiayaan, kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya

untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia (aparatur pemerintah desa), dan sumber daya finansial.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja, sumber daya pada akhirnya menunjukkan kemampuan pelaksana kebijakan. Sumber daya seperti orang dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup memadai, akan tetapi masih terkendala dengan keterbatasan pendidikan dan anggaran yang dimiliki sehingga hal tersebut menjadi kendala dari implementasi kebijakan. Sumber daya begitu berperan dan implementasi kebijakan yang mencakup pegawai, dan fasilitas sarana dan prasarana dan hal tersebut belum terpenuhi

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar

kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan

Dalam penelitian ini kecenderungan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari kebijakan yang direncanakan dan yang direalisasikan dan umpan balik dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Hal-hal tersebut cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan. Adanya kebijakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan atas kekurangan anggaran pembangunan, sehingga diharapkan pelaku kebijakan mempunyai perilaku yang mendukung implementasi kebijakan

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan mengenai kebijakan, ini berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan oleh pelaksana kebijakan adalah komitmen atas kebijakan tersebut, kejujuran, serta mengembangkan sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya

pelaksanaan kebijakan. terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Standard Operational Procedure atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan Standard Operating Procedure (SOP). Fungsi dari Standard Operating Procedure (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan,

sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. SOP itu gunanya sebagai ukuran untuk melaksanakan kebijakan, sehingga dari itu dapat mengevaluasi bahwa kebijakan tersebut apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak karena setiap kebijakan itu terdapat kendala-kendala dan hambatan-hambatan.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab atas implementasi suatu kebijakan sehingga memerlukan koordinasi dalam pengimplementasiannya. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga di desa. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap program dan kebijakan yang akan diterapkan di desa tidak dapat berjalan efisien dan efektif jika tidak di koordinasikan dengan seluruh lembaga desa seperti BPD dan LPMD, Tokoh Adat,

Tokoh Masyarakat. Jika ditelaah maka koordinasi itu penting untuk implementasi kebijakan, karena dengan adanya koordinasi berdampak pada kesepahaman antara lembaga yang terdapat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi menunjukkan :

1. Komunikasi yaitu : transmisi, kejelasan, konsistensi, maka dapat digambarkan komunikasi belum berjalan dengan baik, dalam mendukung implementasi kebijakan.
2. Sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan telah memadai, sedangkan anggaran dalam kategori belum memadai, telah terdapat informasi sedangkan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, selain itu fasilitas sarana dan prasarana tidak memadai.
3. Disposisi berbagai kebijakan telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa pada disposisi telah berjalan sebagai mana mestinya dengan melihat pada perilaku yang cukup baik dari pelaksana kebijakan.
4. Berdasarkan aspek struktur birokrasi pada implementasi kebijakan

dikategorikan belum berjalan secara baik karena banyak hal yang mengakibatkan tidak berjalan secara baik seperti SOP serta kurang koordinasi pelaksana kebijakan dengan lembaga desa lainnya sehingga menimbulkan kurang efesiennya implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Said, Edisi Revisi, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Agustino, L., 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Abdulsyani, 2007. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Anderson, James E, 1979, *Public policy Making*, Holt, Rinehaet and Winston, New York.
- Bungin, B., 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, W, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Dye, T.R., 1981, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI, Yogyakarta.
-2004. *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan*

- Internasional*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- Hosio, J.E., 2005, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, Laksbang, Yogyakarta.
- H. Rakhmat, 2009, *Teori Administrasi Dan Manajemen Publik*, Pustaka Arif, Jakarta.
- Islamy Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Malang.
- Moekijat, 1995, *Analisis Kebijaksanaan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy, J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi Hadari, 1998, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, GadjahMada University Press, Yogyakarta.
- Patilima Hamid, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Santosa, P, 2008, *Administrasi Publik : Teori & Aplikasi Good Gavernence*, Refika Aditama, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Strauss A. dan Corbin J., 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar Offset.
- Subarsono, A.g., 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- _____ 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Wibawa Samodra, 1994, *Kebijakan Publik (proses dan analisis)*, Intermedia, Jakarta.
- _____ , 2009, *Kebijakan Publik (Proses Dan Analisis)*, Intermedia, Jakarta.
- Winarno Budi, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Med Press, Yogyakarta.